

**“MENYELAMATKAN UANG RAKYAT”  
Urgensi Dipisahkan-Tidaknya BUMN  
dari Pengelolaan Keuangan Negara**

**Yenny Sucipto**

**Diretur Riset**

**Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran**

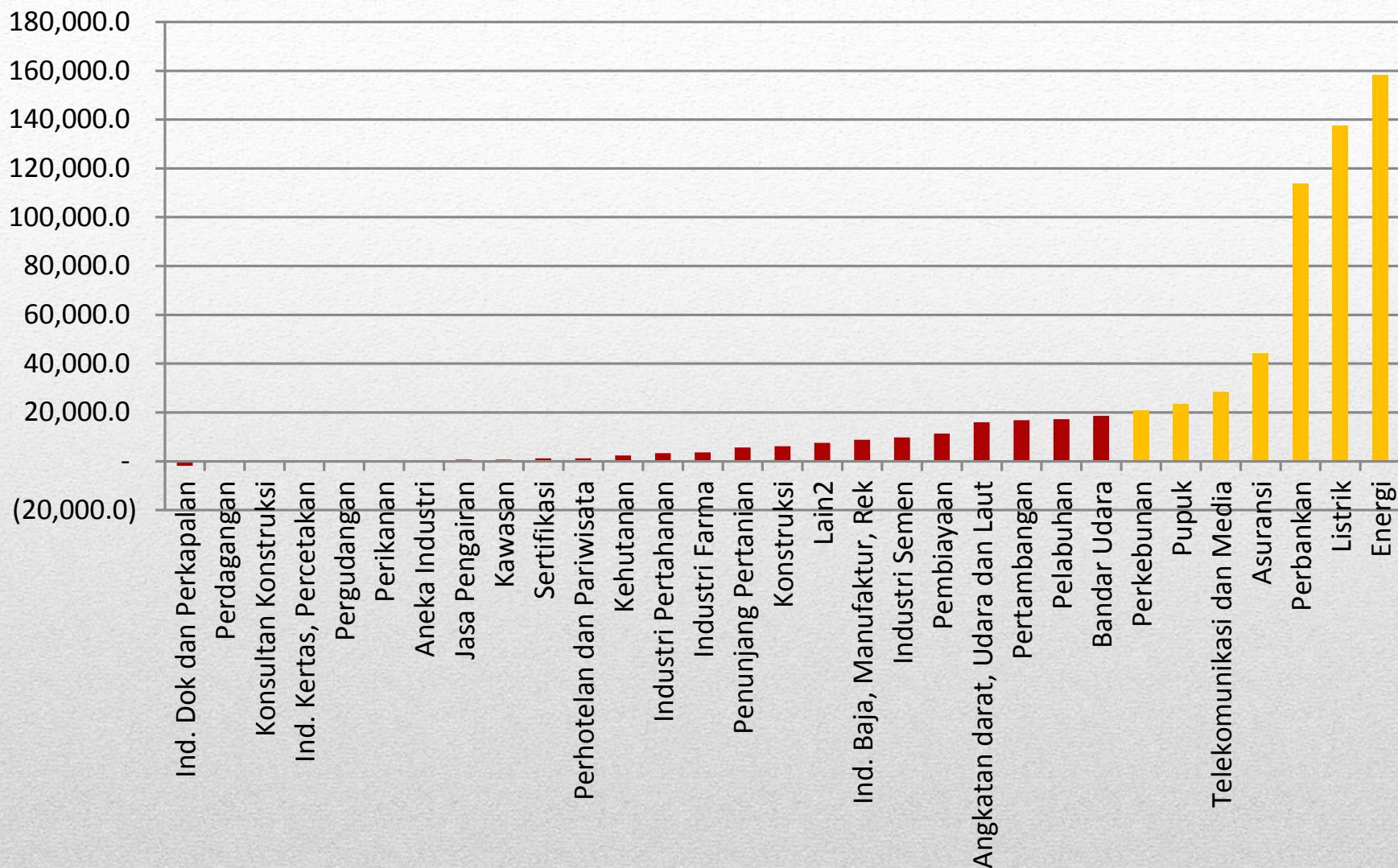
**081559666671**

---

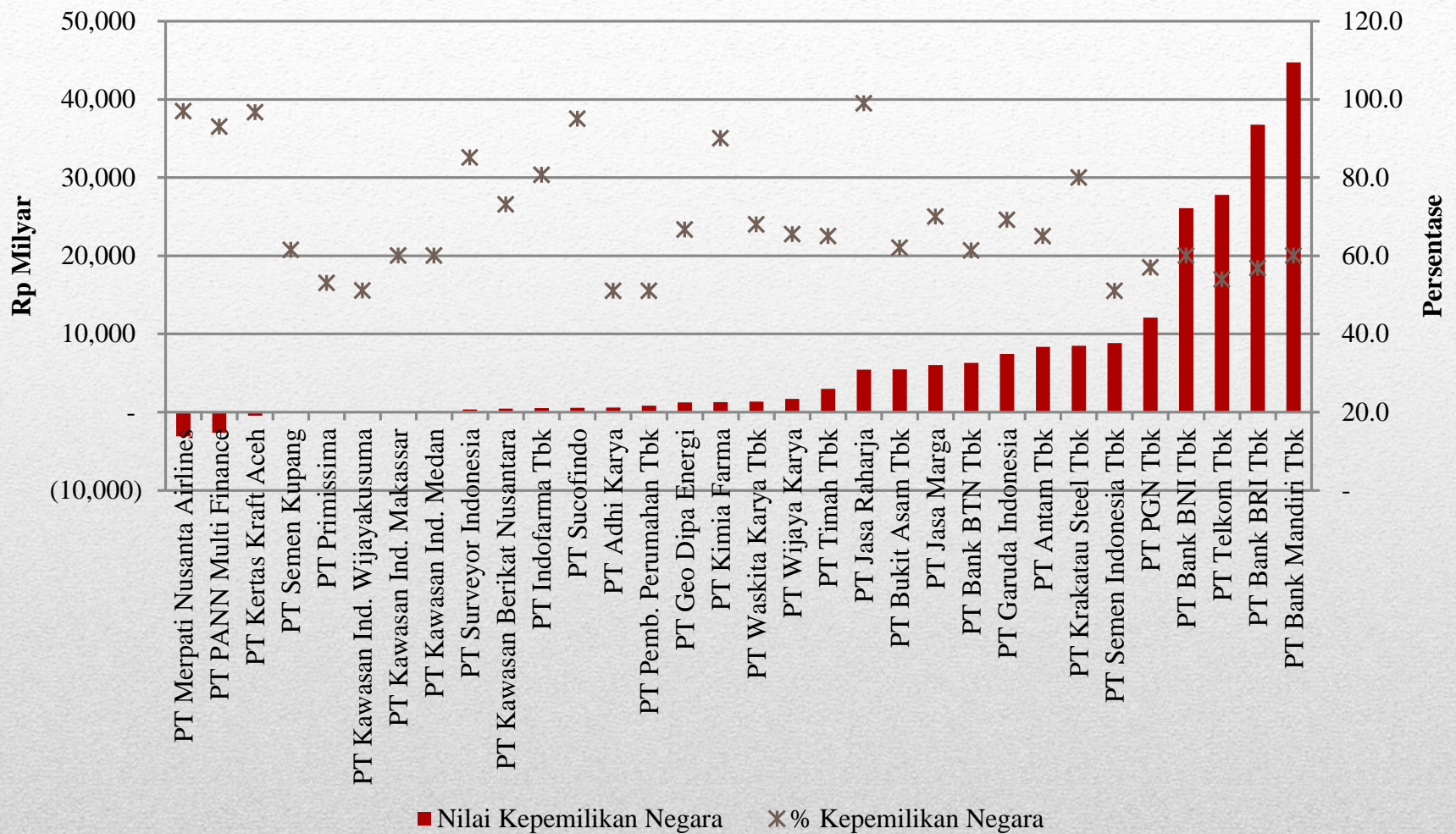
- **Saat ini negara memiliki 141 BUMN**, terdiri dari: 14 Perum, 109 Persero Terbatas, dan 18 Perseroan Terbuka.
- Sebagaimana diketahui perbedaan utama antara Perum dan Persero terletak pada tujuan pendirian dan bentuk badan hukumnya.
- Jika Perum kepemilikan modalnya tidak terdiri dari saham, Persero justru berbentuk saham sehingga dimungkinkan dimiliki swasta dengan prinsip negara harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas (51%).
- Tujuan utama pendirian Perum adalah kemanfaatan umum sementara Persero untuk mengejar keuntungan (profit).
- Penyertaan modal negara di BUMN per Desember 2012 telah mencapai Rp 677,3 triliun.

## **Penyertaan Modal Negara Terhadap BUMN**





**Enam BUMN berdasarkan sektoral dengan Nilai Kepemilikan Negara >20 Triliun (per 31 desember 2012) , antara lain: Energi (158 ,3 triliun), Listrik (137,5 trilun), Perbankan (113,9 triliun), Asuransi (44,3 triliun), Telekomunikasi dan Media (28,5 triliun), Pupuk (23,4 triliun), Perkebunan (20,7 triliun)**



**Nilai kepemilikan Negara < 100% ada di 31 BUMN**



(Rp Triliun)

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Nilai Penyertaan Modal</b>	<b>523,3</b> (31 Desember 2012)	<b>589,8</b> (31 Desember 2012)	<b>677,3</b> (31 Desember 2012)
<b>Laba BUMN/Tahun</b>	<b>102,4</b>	<b>115,6</b>	<b>140,4</b>
<b>Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN (Laba yang disetor)/Tahun</b>	<b>30,1</b>	<b>28,2</b>	<b>30,8</b>
<b>Rugi BUMN/Tahun</b>	<b>23,9</b> (28 BUMN)	<b>10,4</b> (23 BUMN)	<b>2,27</b> (19 BUMN)
<b>Laba Bersih di 141 BUMN (Dikurangi kerugian BUMN/Tahun)</b>	<b>78,5</b>	<b>105,2</b>	<b>138,1</b>
<b>Laba Ditahan (per 31 Desember)</b>	<b>268,4</b>	<b>338,6</b>	<b>407,5</b> (Saldo Laba)

- **Dalam Laporan Keuangan Pemerintah pusat terdapat pelaporan mengenai Laba yang ditahan dalam kurun waktu 3 tahun (2010 – 2012):**
  - **Per 31 Desember 2010 sebesar Rp 268,4 triliun**
    - **PT PLN** Rp 66,4 triliun
    - **PT Pertamina** Rp 43,4 triliun
    - **PT Telkom** Rp 41,9 triliun
    - **PT Bank BRI Tbk** Rp 27,1 triliun
    - **PT Bank Mandiri Tbk** Rp 24,4 triliun
  - **Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 338,6 triliun**
    - **PT PLN** Rp 69,0 triliun
    - **PT Pertamina** Rp 56,3 triliun
    - **PT Telkom** Rp 47,1 triliun
    - **PT Bank BRI Tbk** Rp 40,0 triliun
    - **PT Bank Mandiri Tbk** Rp 33,5 triliun
  - **Per 31 Desember 2012 sebesar Rp 407,5 triliun**
    - **PT Pertamina** Rp 76,5 triliun
    - **PT PLN** Rp 59,4 triliun
    - **PT Bank BRI Tbk** Rp 55,1 triliun
    - **PT Telkom** Rp 52,8 triliun
    - **PT Bank Mandiri Tbk** Rp 46,1 triliun

## **Laba yang ditahan dalam kurun waktu 2010-2012**



- Ada 50 BUMN tidak memberikan setoran ke negara dalam kurun waktu 3 tahun, padahal terdapat laba dari 50 BUMN tersebut sebesar Rp 15,1 triliun (*setelah dikurangi 12 BUMN yang merugi Rp 2,9 triliun*)
- Terdapat 20 BUMN dari 50 BUMN yang diberi tambahan penyertaan modal per 31 Desember 2012 sebesar Rp 4,3 triliun, namun tidak memberikan setoran sama sekali ke APBN.

**Terdapat 50 BUMN Dalam Kurun Waktu 3 Tahun (2010- 2012) Tidak Setor Laba Ke Negara**

---

	akumulasi modal	Tambahan PNM/31 Des'12
PT Inhutani II	(92,7)	6,8
PT Inhutani III	(45,0)	2,3
PT sarana Karya	24,9	7,4
PT EMI	(8,4)	6,5
PT Dirgantara	(381,9)	749,7
PT PAL	861,5	600,0
PT Pinpad	158,1	597,5
PT Barata Indonesia	52,4	15,0
PT Bosma Bisma Indra	12,1	13,2
Sektor Industri Dok dan Perkapalan	104,1	200,6
Sektor Aneka Industri	7,1	194,6
PT Indofarma	91,8	75,1
PT Garuda Indonesia	2.779,5	43,9
PT Pelni	(171,5)	0,1
PT Varuna Tirta Prakasya	18,6	3,1
PT Jamsostek	5.764,8	500,0
PT Askes	4.212,6	1.000,0
PT RUI	221,0	14,3
PT Danareksa	454,0	85,9
PT PPN Multi Finance	464,6	192,0
<b>Total</b>	<b>14.527,6</b>	<b>4.308,0</b>

**20 BUMN yang tidak menyetor laba dalam kurun waktu 2010-2012, padahal telah diberi tambahan PMN**



# 10 BUMN Penyeter Deviden Terbesar *(Rp juta)*

No	Uraian	TA 2010	TA 2011	2012
1	PT Pertamina	9.508.899,7	5.623.103,6	7.257.043,0
2	PT Perusahaan Listrik Negara	4.000.000,0	4.545.000,0	3.500.000,0
3	PT Telkom	2.973.997,4	3.056.196,9	3.832.434,5
	PT Pupuk Indonesia	-	-	2.042.313,5
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.132.115,6	2.141.920,0	1.708.868,5
5	PT Bank Mandiri	1.676.517,8	1.688.383,8	1.469.525,2
6	PT Freeport Indonesia	1.513.926,8	1.761.137,3	-
7	PT Bank Rakyat Indonesia	1.246.070,0	980.560,0	1.711.944,2
8	PT Semen Gresik	933.186,5	751.098,8	1.001.076,5
9	PT Tambang Batubara Bukit Asam	799.079,9	838.674,3	1.049.380,3
10	PT Pupuk Sriwidjaya	617.939,0	-	-
10	PT BNI		738.263,0	699.100,8
<b>Total 10 BUMN</b>		<b>25.401.732,6</b>	<b>22.124.337,6</b>	<b>24.271.686,8</b>

## ❑ *Temuan Kasus di Tubuh BUMN Sepanjang Periode 2008 - 2011*

- Dalam kurun waktu 2008 - 2011, ditemukan sebanyak 2.186 kasus di tubuh BUMN dengan nilai temuan sebesar Rp 125,5 triliun.
- BUMN induk perusahaan saja terdapat 2.020 kasus dan pada BUMN anak perusahaan terdapat 166 kasus
- Dari total kasus yang ditemukan, per 31 desember 2011 masih terdapat 968 kasus dengan total nilai sebesar Rp 884,7 milyar yang belum ditindak lanjuti.
- Uang negara pun yang baru disetor dari hasil tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hanya senilai 5,3 trilun.
- Padahal ada 2.045 kasus yang sudah dianggap selesai sesuai rekomendasi dengan total nilai 9,1 triliun dalam kurun waktu 3 tahun

- ❑ Sepanjang tahun 2009 – 2011 telah ditemukan beberapa kasus BUMN yang menyebabkan potensi kerugian negara baik temuan kasus pada BUMN sebagai pelaksana subsidi pemerintah, ketidak patuhan atas operasional maupun kasus pada pemeriksaan untuk tujuan tertentu. **Pada tahun 2011 terdapat 154 kasus ketidak patuhan terhadap ketentuan perundangan – undangan senilai Rp 3,1 trilun, dimana sebanyak 63 kasus dari total senilai 2,5 trilun mengakibatkan kerugian negara.**

---

## **Temuan Potensi Kerugian Negara oleh BUMN.**



No	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset ke Negara
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Niai	Jml	Niai	
1	PT Pertamina	400	3.936.798	670	389.660	448	303.733	7	12.147	215	73.780			303.733
2	PT PLN	131	55.405.251	215	2.268.335	66	1.871.063	84	241.989	60	155.283	5		1.867.707
3	PT Kereta Api Indonesia	71	667.320	176	112.709	21	1.865	49	30.494	100	80.350	6		1.865
4	Perum Bulog	67	881.362	136	293.787	56	185.659	32	18.885	47	89.243	1		184.487
5	PT Pelayaran Nasional Indonesia	55	506.771	110	129.895	28	3.982	22	1.120.363	60	5.549			264
6	PT PAL Indonesia	16	2.043.204	53	247.676					53	247.676			
7	Perum Perumnas	15	44.060	28	12.671	5		16	5.425	7	7.246			
8	PT Hotel Indonesia Natour	12	33.599	24	33.599					24	33.599			
9	PT Industri Kereta Api	12	250.293	25	21.215	3	418	4		18	21.215			
10	PT Pengembangan Pariwisata Bali	5	30.355	12	3.714					12	3.721			

**10 Besar Temuan Kasus Terbesar di Tubuh BUMN (Induk Perusahaan) dalam Periode 2008 -2011 (Rp juta)**

# **Kesimpulan dan Rekomendasi**

---



- **Dampak paling krusial jika pengelolaan BUMN dipisahkan (dipisahkan dari kekayaan negara)**
  - Ada uang negara (uang rakyat) di BUMN yang begitu besar sampai mencapai Rp 677,3 triliun.
  - Jika pengelolaan keuangan BUMN dipisahkan dari keuangan negara sama dengan mengaborsi kewenangan BPK dalam mengaudit keuangan BUMN. Audit BUMN akan murni menggunakan prinsip audit internal perusahaan (UU Perseroan Terbatas);
  - Pemisahan pengelolaan keuangan BUMN justru akan berpotensi semakin mempertinggi tingkat penyimpangan keuangan negara karena tidak ada lagi peran BPK di dalamnya.
  - Jika pemisahan pengelolaan keuangan BUMN benar-benar dipisahkan nantinya, siapa yang akan bertanggung jawab jika uang rakyat sebesar Rp 677,3 triliun yang tertanam di BUMN digelapkan, karena penggunaannya tidak lagi di pertanggungjawaban kepada negara secara langsung?

## **1. Menyelamatkan Uang Rakyat Sebesar Rp 677,3 triliun.....**

---



- Walaupun BUMN bentuknya persero, namun kita tidak bisa mengabaikan keberadaan Pasal 33 UUD 1945 yang tetap menuntut kehadiran negara untuk tetap menguasai setiap cabang usaha yang menyangkut khalayak hidup orang banyak.
- Tidak urgen jika pemisahan pengelolaan keuangan BUMN didasarkan pada perdebatan tentang BPK yang tidak berwenang mengaudit karena BUMN bukan lembaga negara. Yang paling urgen ke depannya justru dimanapun dan siapapun yang menggunakan uang rakyat wajib diaudit oleh BPK, apakah itu lembaga negara ataupun bukan!
- Jika alasan pemisahan karena BUMN membebani APBN jika tetap disatukan pengelolaan keuangannya juga salah kaprah. Terbebannya APBN oleh BUMN selama ini bukan karena penyatuan pengelolaan keuangan, tetapi karena tidak adanya regulasi tentang batasan penyertaan modal negara sehingga pemerintah tidak proporsional (membabi buta) dalam menyertakan modal sehingga menjadi tidak sebanding dengan laba yang disetor BUMN.
- Tanpa pemisahan saja (dengan kontrol dan audit ketat dari BPK), setoran BUMN kepada APBN masih tidak sebanding dengan total nilai penyertaan modal negara yang mencapai 677,3 triliun (hanya 30,8 triliun yang disetor).
- Bagaimanapun BPK tetap dibutuhkan untuk menyelamatkan uang rakyat di BUMN. Sepanjang tahun 2008-2011 BPK telah berhasil menemukan kasus penyimpangan di BUMN hingga mencapai Rp 125,5 triliun. Sehingga isu pemisahan pengelolaan BUMN sama dengan tidak menghendaki BPK ada dan hadir di BUMN lagi!

---

## **2. Tidak Urgen Untuk Memisahkan Pengelolaan BUMN**



- Jika menyoal laba yang ditahan BUMN sungguh sangat fantastis, karena laba yang ditahan tersebut mencapai Rp 407,5 triliun pada TA 2012. Sehingga harus ada klarifikasi bersifat wajib dari pemerintah kepada rakyat, kenapa laba yang ditahan menjadi begitu besar!
- Jika saja sebagian kecil laba yang ditahan tersebut disetorkan ke APBN, sudah dapat menutupi defisit sebesar 80 triliun, **sehingga Pemerintah tidak perlu menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun.**
- Laba yang ditahan sangat juga mampu menutupi pembengkakan subsidi BBM sebesar Rp 16,1 triliun dan kompensasi Rp 30 triliun tanpa harus menaikkan harga BBM sebesar Rp 6.500,-;
- Bahkan laba yang ditahan juga mampu mengembalikan subsidi kedelai (Rp 225,7 triliun) dan minyak goreng (Rp 103 triliun) yang sudah dihapus sejak tahun 2008 dalam belanja subsidi negara
- Bahkan bisa digunakan untuk desain program perluasan lahan petani 500 – 1 juta Ha untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor menuju kedaulatan pangan.

---

### **3. Laba Ditahan Mestinya Mestinya Untuk Rakyat**